

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bahsan M, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Cristiawan Rio dan Januar Agung S. *Jaminan Hak Tanggungan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2021.
- Darus M. Luthfan H. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- H. Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2011.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi. Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jayadi Ahkam, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*, Yogyakarta: Genta press, 2015.
- Khoidin M, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan*, Surabaya: laksbang Yustitia Surabaya, 2017.
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Muhammad Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia: suatu penjelasan*, Jakarta: Rajawali 1982.
- Sari, Annita, Dahlan, Ralph August N.T, Yudi Prayitno, Willem Hendry S, Supiyanto, Anastasia Sri Werdhani. *Dasar-Dasar metodologi penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.
- Santoso Lukman dan Yahyanto, *Pengantar ilmu hukum*, Malang: Setara Press, 2016.

- Sumardjono, Maria SW. *Metodelogi penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Suratman dan Dillah Philips. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Susanto, Herry. *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2010.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana 2004.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012.
- Sjaifurrachman dan Adjie Habib, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Eknomi Syariah*, Depok: Rajawali pers, 2018.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), *Staatsblad* 1847-23.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Hak Tanggunganatas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang penetapan batas waktu penggunaan SKMHT untuk menjamin pelunasan kredit tertentu. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

### C. JURNAL

Agustini Dsk Putu. A.L dan Aju Putrijanti, “Analisis Penyalahgunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam Praktik Hukum Jaminan di Indonesia”, *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 11, No. 1, (Februari 2025): 41-51. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i1.6949>

Aslan Noor et al, “Rekonseptualisasi Kewenangan Notaris Dan PPAT Membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, No.2, (Juni 2023): 234-244. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1467>

Budiman, Nanang Tri dan Hariandja, Tioma R., “ Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan(SKMHT) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember” *Jurnal Rechtsens* 2, No. 2 (Desember 2013): 56-72. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v2i2.85>

Sagita Elvarreta Grisseldis et al, “ Akibat Hukum Belum Teraktifasinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) karena Berakhirnya Jangka Waktu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)”, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, No. 1, (Januari2024): 116-124. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/490>

Tandean, et al, “Ketidakhadiran Debitor Dalam Pelaksanaan Pembaharuan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan”, *Pagaruyuang Law journal* 4, No.2 (Januari 2021) : 168-178.  
<https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2465>

Wijaya, I Made D. A, et al “Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Oleh Klien Secara Bersama-sama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014” *Lex privatum* 13, No 5 (Juli 2024): 1-11  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57065>

#### **D. TESIS**

Aulia Putri Andhini, “Kewenangan Notaris/PPAT Untuk Mengubah Tanggal Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Kadaluarsa Untuk Ditindaklanjuti Ke Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2021.